

Perencanaan pendampingan mutu lembaga PKBM di Kota Cimahi

Cucu Sukmana¹, Dadang Yunus Lutfiansyah², Purnomo³, Eko Sulistiono⁴
^{1,2,3,4} **Departemen Pendidikan Masyarakat, Universitas Pendidikan Indonesia**
*cucusukmana@upi.edu

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan PKBM Ash-Shoddiq Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri menitikberatkan pada item-item yang mengandung makna subjektif dan definitif serta deskripsi penelitian berdasarkan skema dan pemikiran peneliti. Sumber data penelitian ini adalah tiga sumber yang terdiri dari sumber informasi yaitu ketua dan pemilik PKBM yaitu Dadang Lutfiansyah, M.Pd. Serta dua orang di sekitar PKBM yang bisa memberikan data. Untuk meningkatkan pengumpulan data lapangan, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi secara online dan pada bulan April 2021 dengan akses langsung ke penjaga objek penelitian dan media sosial objek penelitian. dan menggunakan teknik sampling yang ditargetkan. Hasil penelitian menunjukkan data yang diperoleh terkait dengan Pengelolaan PKBM meliputi tahapan pengelolaan yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan (Motivating), Pembinaan (Comforming), Penilaian (Evaluating), Pengembangan (Developing). Permasalahan PKBM adalah kurangnya sarana prasarana dan sarana (ruang kelas yang kurang, ruang kelas, tenaga pengajar, area site yang kecil). Hal ini dikarenakan keterbatasan dana dan tidak sebanding dengan letak fasilitas PKBM. Di tengah kawasan wisata yang sibuk. Ini dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara.

Kata Kunci : Perencanaan, Pendampingan Mutu, PKBM

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe and analyze the management of PKBM Ash-Shoddiq, Pagerwangi Village, Lembang District, West Bandung Regency. This study was conducted using descriptive research methods with a qualitative approach. The qualitative approach itself focuses on items that contain subjective and definitive meanings and descriptions of research based on the schemes and thinking of researchers. Data sources for this study were three sources consisting of information sources namely PKBM chairman and owner namely Dadang Lutfiansyah, M.Pd. As well as two people around PKBM who can provide data. To enhance field data collection, the researchers used observation, interview, and documentation techniques online and in April 2021 with direct access to the study object's custodian and the object's social her media. and used targeted sampling techniques. The results showed data obtained in relation to PKBM management includes a management phase that includes the following steps Planning, Organizing, Implementation (Motivating), Coaching (Comforming), Assessment (Evaluating), Development (Developing). PKBM has not yet accredited as only three groups of the Equality Education Program have been completed. The problem of PKBM is the lack of facility equipment and infrastructure (less classrooms, classrooms, teaching staff, small site area). This is due to lack of funds and is not comparable with the location of PKBM facilities. In the middle of a busy tourist area. It is visited by domestic and foreign tourists.

Key Words : Planning, Quality assistance, PKBM

Articel Received: 29/03/2023 **Accepted:** 30/09/2023

How to cite: Sukmana, C., Lutfiansyah, D.Y., Purnomo., & Suistiono, E. (2023). Perencanaan pendampingan mutu lembaga PKBM di Kota Cimahi. *Abdimas Siliwangi*, Vol 6 (3), 661-674. doi: 10.22460/as.v6i3.17679

A. PENDAHULUAN

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan proses pendidikan diwujudkan dengan mendirikan satuan pendidikan nonformal, dan bekerjasama dengan pemerintah melalui satuan kerja pendidikan nonformal dan informal. Kegiatan yang merupakan bagian dari pendidikan nonformal termasuk kegiatan literasi. Salah satu organisasi nonformal satuan pendidikan yang melakukan kegiatan literasi adalah PKBM/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Siti Almaidah; 2017:163). Menurut data PAUD DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019/2020 Jumlah PKBM Satuan Pendidikan di Kab. Bandung Barat memiliki PKBM sebanyak 47 lembaga yang memiliki program PNF. PKBM dengan berbagai program PNF dan kewirausahaan sosial memberikan daya dukung bagi pelaksanaan PKBM dan pengembangannya. Namun, 47 PKBM di Kabupaten Bandung Barat masih on-off. Tergantung dana dari pemerintah. Melihat kondisi dan kelembagaan PKBM memberikan peluang untuk memberikan pendampingan manajerial kepada PKBM agar mandiri dan mampu memberikan pelayanan pendidikan non formal yang baik. (Van der Linden, 2015). Pendampingan pengelolaan program Kegiatan berbasis kewirausahaan dilaksanakan untuk memberikan penguatan dan pemberdayaan sebagai upaya mewujudkan kelembagaan PKBM yang mandiri (Menuju & Berwirausaha, 2022).

Masalah yang sangat penting, khususnya dalam organisasi PKBM sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan, sebagaimana dijelaskan oleh (Basri et al., 2018) bahwa pengelolaan PKBM memiliki perbedaan antara harapan dan kenyataan. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan jumlah PKBM, namun tidak diikuti dengan bertambahnya jumlah masyarakat yang terlayani dan belum mengukir kinerja. (Suryadi & Mutiara, 2020) menggambarkan pertumbuhan PKBM masih bersifat kuantitas, tidak disertai kualitas. Rendahnya kualitas pengelolaan PKBM disebabkan oleh tiga hal yaitu kualitas input, kualitas proses dan kualitas output (Varanda Marques & de Freitas, 2016). Hasil penelitian Bitasari (Saepudin et al., 2019) di Semarang menunjukkan pengelolaan pembelajaran pada program pendidikan PKBM telah menerapkan pendekatan andragogi

dengan cukup baik, namun tujuan PKBM yang berorientasi pada pengembangan aspek ekonomi (pekerjaan dan pendapatan) belum tercapai dengan baik. Bertolak dari kondisi tersebut, diperlukan upaya-upaya ke arah pemberdayaan PKBM khususnya dalam mengelola program pendidikan kesetaraan berbasis kecakapan hidup dan kewirausahaan(Rizka & Hardiansyah, 2016).

Seperti yang terjadi pada sebagian besar PKBM yang ada di Indonesia, PKBM memiliki berbagai permasalahan. Masalah-masalah yang timbul juga merupakan masalah-masalah mendasar yang dihadapi masyarakat(Zikargae et al., 2022). Keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan dana, kurangnya motivasi belajar warga belajar, kurangnya kesadaran warga masyarakat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan, sulitnya mencari waktu yang tepat antara tutor dan warga belajar, terbatasnya ketersediaan tutor yang berkompeten, sulitnya mendapatkan izin operasional , jauhnya jarak antara warga belajar dengan tempat belajar, kurangnya kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, sulitnya mencari mitra untuk berkolaborasi dalam rangka meningkatkan kualitas PKBM, adalah beberapa permasalahan umum yang terjadi di PKBM(Widodo dkk., 2021).

Permasalahan yang muncul dalam PKBM merupakan cerminan nyata perlunya keterlibatan seluruh warga dan seluruh sumber daya manusia yang peduli terhadap peningkatan kualitas PKBM. Kualitas setiap PKBM berbeda satu sama lain (Usman & Tasya, 2020). Ini adalah kondisi nyata yang tidak bisa dihindari. Salah satu faktor penentu kualitas PKBM adalah kualitas pengelola PKBM, selain tutor, yang merupakan agen perubahan sebuah organisasi PKBM. Pengelola PKBM akan sangat terkait dengan kualitas pelayanan yang diberikannya kepada warga belajar dan tutor, serta penyediaan program fasilitas penunjang di PKBM. Kualitas pelayanan PKBM akan sangat menentukan keberhasilan program PKBM (Purwanto et al., 2018). Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kualifikasi dan kompetensi yang memadai, akan memiliki peran penting dalam pengelolaan PKBM serta peningkatan kualitas pelayanan yang ideal. Ini dipegang oleh pengelola PKBM (Istiqomah & Artikel, 2017). Pendidikan dalam penyelenggaraannya tidak lepas dari masalah biaya atau moneter, baik biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat maupun orang tua.(Dacholfany, 2018)biaya pendidikan adalah semua pengeluaran yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Segala pengeluaran yang tidak berhubungan langsung

dengan penyelenggaraan pendidikan dapat disebut sebagai pemborosan atau pengeluaran yang boros sebenarnya dapat dihindari atau dicegah (Putih, 2016). Lembaga pendidikan dikatakan boros apabila dana operasional, dana pengembangan dan dana yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut melebihi dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan di satuan kerja tersebut (Oyigbo et al., 2021). Penarikan dana sekolah yang melebihi dana yang tersedia untuk menyelenggarakan pendidikan berarti lembaga pendidikan tersebut boros (Gunartin et al., 2018).

B. LANDASAN TEORI

Konsep pendidikan nonformal sebagai subsistem pendidikan nasional sangat luas dan kompleks. Secara teoritis Sudjana dalam bahasa Sapudian (2015:95) mendefinisikan pendidikan ekstrakurikuler sebagai terorganisir dan sistematis, di luar sistem sekolah utama, dilakukan secara mandiri atau sebagai bagian penting dari kegiatan yang lebih besar yang dilakukan dengan sengaja untuk membantu siswa tertentu mencapai tujuan pembelajaran. Gagasan PKBM sebagai satuan pendidikan luar sekolah muncul pada awal tahun 1990-an dan menjadi populer pada pertemuan para pemimpin dunia. Dalam penelitiannya, Jajat S. Ardiwinata (2014:100) menjelaskan bahwa dalam World Declaration on Education for All (EFA) di Jomtien, Thailand tahun 1990, hampir 155 negara memulai keberadaan Community Learning Center (CLC) sebagai cikal bakal munculnya istilah PKBM di Indonesia. Sihombing dan Gutama (2000:34) menyatakan PKBM adalah lembaga pendidikan yang dikembangkan dan dikelola masyarakat di luar sistem pendidikan formal baik di perkotaan maupun di pedesaan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar bagi semua lapisan masyarakat agar mampu berkembang secara mandiri untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, PKBM berfungsi sebagai tempat masyarakat mempelajari berbagai pengetahuan atau keterampilan dengan memanfaatkan sarana, prasarana dan potensi daerah sekitar (desa, kota), sehingga masyarakat memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf aktivitas, pencapaian kehidupan sosial dan pembelajaran. Dalam pengertian ini, masyarakat yang berkinerja tinggi adalah masyarakat yang ingin belajar. Laila Hayati (2011:181) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa prestasi tidak akan pernah lahir selama seseorang tidak pernah melakukan kegiatan belajar.

Tujuan lain dari pelaksanaan program pelatihan PKBM adalah untuk meningkatkan keterampilan anggota masyarakat agar mereka memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi sepanjang hidup mereka. Kompetensi yang relevan dicapai hanya melalui proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan, sikap dan keterampilan. Menurut Oos M. Anwas (2011:193) Kompetensi adalah kemampuan yang didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang didukung oleh sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pekerjaan. Artinya hanya mereka yang mau belajarlh yang berkualitas. Salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah dengan belajar di unit pelatihan PKBM. Menurut Sihombing. (1999:12) Beberapa prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menyusun dan menerjemahkan program PKBM adalah: a) Program yang dikembangkan oleh PKBM harus bersifat luas, sehingga warga belajar memiliki banyak kesempatan selama belajar untuk mengembangkan pengalaman yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai dalam kaitannya dengan etika, estetika, logika dan kinestetik; b) Program harus memiliki prinsip yang seimbang dimana setiap kualifikasi yang dikembangkan dalam program PKBM harus dicapai dengan memberikan waktu yang cukup untuk pembelajaran yang efektif; c) Program-program yang dikembangkan PKBM harus relevan karena setiap program berkaitan dengan penyiapan warga belajar untuk meningkatkan kualitas hidup melalui kesempatan, pengalaman dan tindakan serta latihan yang bertanggung jawab untuk mencapai kematangan berpikir. d) PKBM harus dapat merepresentasikan konsep perbedaan (differentiated), asas ini merupakan karya pengabdian individual dimana warga belajar memahami apa yang harus dipelajari; cara berpikir, cara belajar dan bertindak untuk mengembangkan potensi dan kebutuhan setiap orang secara optimal. Agar prinsip-prinsip PKBM dapat dilaksanakan sesuai dengan minat dan kemampuan masyarakat, maka perlu disusun standar minimal pengelolaan pelaksanaan PKBM berbasis masyarakat.

Tujuan penyusunan standar minimal PKBM adalah standar dan prosedur pelaksanaan PKBM (Kemendikbud, 2015: 3) adalah (a) PKBM yang terpelajar dapat mengadaptasi dan menyesuaikan proses pelaksanaannya dengan segala peluang dan sumber daya yang ada di lingkungannya, sekaligus memberikan informasi tentang kepentingan pembangunan yang lebih luas; dan (b) dapat digunakan sebagai sarana untuk memfasilitasi pembentukan PKBM oleh aparat pemerintah di masyarakat.

Cakupan standar minimum PKBM diukur berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005. Kedelapan aspek tersebut adalah (1) Standar Isi, (2) Standar Proses, (3) Standar Lulusan, (4) Standar Pendidik, (5) Standar Infrastruktur, (6) Standar Manajemen, (7) Standar Evaluasi, (8) Standar Keuangan (Evaluasi Pedoman)) Dimas, 2014: 3). Sesuai dengan fungsi inti dan pendukung PKBM, setidaknya ada empat bidang fungsional yang harus dikelola oleh pengelola PKBM. Bidang aplikasi adalah: Pertama, pelatihan meliputi kegiatan pendampingan atau penasehat, pengajaran dan pelatihan. Kedua, layanan informasi, meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) Mengumpulkan informasi dari PKBM, masyarakat sekitar dan pihak eksternal. (2) Memberikan layanan informasi kepada masyarakat sekitar dan instansi luar. Ketiga, jaringan informasi dan kemitraan meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut: (1) Membangun jaringan pengetahuan dan kemitraan dengan lembaga yang ada di masyarakat dan sekitarnya dalam penyelenggaraan kegiatan PKBM dan lembaga mitra. (2) Mendukung jaringan yang telah terbentuk dan Keempat, mendukung staf pelatihan PKBM, meliputi kegiatan sebagai berikut meningkatkan kualitas kinerja pengurus dan guru (tutor, nara sumber) baik secara mandiri maupun dengan bantuan bimbingan eksternal.

C. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena analisis datanya dideskripsikan secara verbal yang menggambarkan perencanaan, pelaksanaan dan hasil pengelolaan PKBM di Kota Cimahi.(Ali et al., 2020). Pendekatan kualitatif sendiri menitikberatkan pada unsur-unsur yang mengandung makna subjektif, definitif, serta gambaran penelitian berdasarkan skema atau kerangka kerja peneliti.(Nurasia et al., 2018). Sumber data penelitian ini adalah tiga informan yang terdiri dari: Sumber informasi yaitu pimpinan lembaga PKBM di wilayah Kota Cimahi. serta dua orang dari masyarakat sekitar PKBM yang bisa memberikan data. Sebagai penguat perolehan data lapangan, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi secara online dan langsung terjun ke lapangan pengelola objek penelitian, serta media sosial objek pada Maret 2023. Menurut Sugiyono(Sugiono, 2015)mengatakan bahwa, "Purposive Sampling adalah teknik

pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel ini lebih cocok untuk penelitian kualitatif.(Bones, 2020).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar mutu

Standar Kompetensi Lulusan berdasarkan hasil lapangan di lembaga PKBM adalah sebagai berikut: 9 warga belajar yang mengikuti program pendidikan kecakapan hidup tahun 2020, 20 program literasi tahun 2019, program pembinaan kepemudaan dan olahraga sepak bola, program kecakapan hidup kewirausahaan desa, PKBM pada tahun 2020/2021 sebanyak 86 mahasiswa, dan belum mengajukan akreditasi institusi. Standar isi berdasarkan hasil lapangan di lembaga PKBM adalah sebagai berikut(Apandi et al., 2022). Kurikulum yang digunakan PKBM mengacu pada kurikulum pendidikan nasional yaitu kurikulum 2013, kalender pendidikan mengacu pada kalender akademik yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan namun disesuaikan dengan kondisi lembaga yang dirumuskan pada awal semester dengan kepala sekolah, guru/tutor, komite dan disosialisasikan kepada orang tua siswa(Fakhruddin & Shofwan, 2019).

Standar Proses berdasarkan hasil lapangan di lembaga PKBM adalah sebagai berikut: pembuatan silabus/RPPM, RPP/RPPH dilakukan pada awal semester atau sebelum proses pembelajaran/pelatihan dilaksanakan, pelaksanaan supervisi pembelajaran dilakukan setiap hari baik materi dan pembelajaran, presensi siswa, absensi pendidik melakukan rekap tugas kepada siswa, serta melakukan remedial dan pengayaan kepada peserta mengajar program kejar paket, life skill setelah melakukan latihan atau ujian(Komar, 2017).

Implementasi Program

Perencanaan program PKBM mengungkapkan beberapa indikator dari berbagai tahapan perencanaan yang telah dilakukan oleh pengelola PKBM melalui pendekatan manajemen pendidikan nonformal, antara lain: a. Keberadaan administrasi meliputi data calon warga belajar dan warga belajar, data kondisi pendidikan penduduk, data kondisi mata pencaharian warga, data warga yang tidak melanjutkan ke pendidikan formal. B. Ada dokumentasi kesepakatan dengan tokoh masyarakat setempat untuk pendirian PKBM. C. Adanya penetapan visi, misi dan tujuan PKBM (1. Visi: Terwujudnya masyarakat yang lebih cerdas, religius, terampil, mandiri, berbudi luhur, produktif yang pada

gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup dan hidup rukun, serta selalu mengembangkan potensi diri; 2. Misi: Mengembangkan dan memfasilitasi pembelajaran yang dinamis dan upaya pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan lokal, serta menggerakkan sumber daya dan partisipasi masyarakat (baik masyarakat maupun masyarakat luas) dalam upaya mendukung pelaksanaan program pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat.). D. Ada persiapan proposal pendirian. Pada tahap pengorganisasian, pengurus PKBM menentukan pembagian kerja (job desk), tanggung jawab yang jelas bagi setiap individu dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama. serta menggerakkan sumber daya dan partisipasi masyarakat (baik masyarakat maupun masyarakat luas) dalam upaya mendukung pelaksanaan program pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat). D. Ada persiapan proposal pendirian. Pada tahap pengorganisasian, pengurus PKBM menentukan pembagian kerja (job desk), tanggung jawab yang jelas bagi setiap individu dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama. serta menggerakkan sumber daya dan partisipasi masyarakat (baik masyarakat maupun masyarakat luas) dalam upaya mendukung pelaksanaan program pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat). D. Ada persiapan proposal pendirian. Pada tahap pengorganisasian, pengurus PKBM menentukan pembagian kerja (job desk), tanggung jawab yang jelas bagi setiap individu dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama.(Fakhruddin & Shofwan, 2019). Sehingga manajer dituntut untuk dapat menghimpun dan mengalokasikan semua sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia, kemudian mengkoordinasikan anggotanya agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.(Elihami, 2020).

Pada tahap implementasi (motivasi) pendekatan yang dilakukan manajer dapat dikatakan cukup baik. Pengelola PKBM membagi menjadi 3 bidang, antara lain: Bidang pendidikan, pendekatannya adalah mengidentifikasi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, serta memberikan motivasi untuk belajar warga(Gadotti, 2011). Bidang informasi manajemen menyediakan layanan informasi dalam rangka sosialisasi dan promosi PKBM(Van der Linden, 2015). Bidang Kemitraan Manajemen membuat proposal pengajuan hibah, baik berupa dana tunai maupun bentuk dana lainnya yang ditujukan untuk pengembangan program kegiatan PKBM. Pada tahap conforming yang

dilakukan PKBM hanya pada level pembinaan eksternal, artinya tutor dan warga belajar cenderung mengikuti pembinaan jika ada kegiatan pembinaan dari lembaga lain sebagai lembaga pembina PKBM itu sendiri.(Putri, 2018). Sehingga tidak terlihat adanya upaya pengembangan keprofesian yang dilakukan oleh para pengelola itu sendiri(Madjar & Cohen-Malayev, 2013). Namun, ternyata pembinaan yang berkesinambungan diperoleh dari upaya tutor ketika berhadapan langsung dengan warga belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun pengelola jarang atau bahkan tidak pernah memberikan pembinaan secara formal, namun jika didukung dengan perhatian dan komunikasi yang efektif antara pengelola dan tutor diyakini telah ada upaya pembinaan meskipun hanya bersifat non formal.(Usman & Tasya, 2020).

Pada tahap evaluasi yang dilakukan oleh PKBM dilakukan setiap 6 bulan sekali namun terkadang juga bersifat fleksibel dan insidental. Evaluasi pembelajaran di PKBM sama dengan yang dilakukan oleh pendidikan sekolah seperti mengadakan UTS, UAS dan UAN. Pada tahap pengembangan yang dilakukan oleh PKBM antara lain: bekerjasama dengan berbagai pihak baik masyarakat sekitar, pemerintah, perusahaan swasta, instansi lain yang terkait dengan Pendidikan Masyarakat; serta memperluas jangkauan program, pengelola memperluas informasi tentang program-program yang ada di PKBM dengan memasang brosur penerimaan mahasiswa baru baik melalui media cetak maupun media sosial. Penjelasan tersebut diperkuat dengan pendapat dari(Herlinda et al., 2017)menjelaskan bahwa : Pada tahap pengembangan, guna menjaga kesinambungan program, dimana pendidikan akan terus berkembang, pengelola harus tetap menerapkan pendekatan manajemen Pendidikan Non Formal seefektif dan seefisien mungkin, karena tidak menutup kemungkinan bahwa jika salah satu pendekatan pengelolaan PNF tidak dilaksanakan, dikhawatirkan akan melumpuhkan program yang dilaksanakan(Varanda Marques & de Freitas, 2016).

Kekuatan, kekuatan pelaksanaan PKBM, yaitu: 1) PKBM merespon kebutuhan masyarakat yang putus sekolah atau masyarakat yang tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal. 2) pelaksanaan PKBM didasarkan pada kebutuhan siswa. 3) Program disesuaikan dengan situasi dan kondisi warga belajar. 4) Ciri-ciri penyelenggaraan pendidikan kesetaraan adalah bersifat fleksibel, dan terdapat 3 dimensi pembelajaran, usaha, dan pengembangan masyarakat yang memungkinkan untuk

disesuaikan dengan berbagai kebutuhan, keunikan dan kepentingan. 5) Diakui dalam UU Sisdiknas sebagai satuan penyelenggara pendidikan nonformal. 6) Adanya anggaran pemerintah baik dari pusat maupun daerah untuk penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. 7) Adanya Forum-forum Pendidikan nonformal baik regional, nasional maupun internasional yang saling mendukung untuk perkembangan dan kemajuan pelaksanaan PKBM. 8) PKBM dapat membuat beberapa program pengabdian masyarakat seperti: program PKH Perempuan, PAUD, Keaksaraan Fungsional, kesetaraan, Majelis Talim, Pemberdayaan Perempuan, Kewirausahaan Pemuda, dan lain-lain. Kelemahan-kelemahan (weaknesses), kelemahan-kelemahan pelaksanaan PKBM antara lain: 1) Masih adanya masyarakat, birokrasi pemerintah, stakeholders terkait yang kurang mengenal dengan baik kerja PKBM sebagai pendidikan pelengkap pendidikan formal. 2) Adanya stigma negatif terhadap pendidikan nonformal di lembaga penyelenggara, misalnya PKBM yang menyelenggarakan program Paket A BC. Bahwa keberadaannya hanya untuk mendapatkan dana dari pemerintah, namun dalam prakteknya dilakukan “dengan asal-asalan” bahkan ada juga yang fiktif. 3) masih banyak pemangku kepentingan yang terlalu kredibel terhadap pendidikan nonformal dan lebih mementingkan pendidikan formal yang berorientasi diploma.(Zikargae et al., 2022).

Peluang, peluang yang ada di PKBM adalah: 1) semakin semrawut pendidikan formal maka pendidikan non formal akan menjadi alternatif. 2) Keberadaan PKBM mampu menjangkau warga yang tidak terlayani pendidikan formal hingga pelosok nusantara.3) Adanya tiga dimensi dalam pelaksanaan program PKBM yaitu pembelajaran, usaha dan pengembangan masyarakat memungkinkan untuk menarik partisipasi masyarakat dan dukungan dari lembaga donor yang lebih luas. 4) Adanya komitmen global terhadap MDGs (Millenium Development Goals) yang implementasinya di tingkat akar rumput sebagian besar berada dalam lingkup PNF. 5) Adanya komitmen global terhadap Education For All dan Lifelong Learning yang sebagian besar merupakan ruang lingkup PNF. 6) berlakunya kebijakan CSR (Corporate Social Responsibility) untuk kemajuan pendidikan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat dengan alokasi dana yang besar dan konsisten. 7) Mulai banyak bantuan internasional untuk masalah pendidikan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan masyarakat. 8) Pendidikan Non Formal diatur langsung dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang menjadi payung hukum yang kuat untuk melaksanakannya(Alexandro, 2020).

Ancaman (threats), ancaman terhadap PKBM adalah: Adanya potensi konflik antar berbagai lembaga yang bertanggung jawab membina dan mengembangkan program pendidikan nonformal, misalnya antara Sudin Pendidikan Kota/Kabupaten, SKB, BPKB, Dinas Pendidikan Provinsi Sub Dinas, BPPLSP, FK Kabupaten/Kota, PKBM Provinsi dan Pusat yang jika tidak disikapi secara dewasa dapat menimbulkan upaya kontra produktif bagi gerakan memajukan Program PNFI dan ada beberapa oknum yang merasa terancam dengan keberadaannya gerakan PNFI yang murni dan kuat sehingga mengambil langkah-langkah perlawanan yang dapat menghambat kemajuan agar oknum tersebut tidak kehilangan 'keuntungan' dari 'manipulasi' dan KKN proyek PNFI(Werakul et al., 2014).

E. KESIMPULAN

Dari kajian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan PKBM cenderung baik karena pengelola telah merancang program dari awal dengan baik hingga keluaran (Output) menghasilkan hasil yang memuaskan bagi lulusan warga belajar mereka dapat memiliki keahlian atau keterampilan dan pengetahuan untuk masa depan warga belajar ini baik Peserta Didik dapat membuka usaha sendiri atau dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi.

F. ACKNOWLEDGMENTS

Ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia yang telah mendanai penelitian ini.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Alexandro, R. (2020). Penerapan Total Quality Services untuk Meningkatkan Kapasitas Lembaga Pendidikan Non Formal di Kampung Inggris Kediri. *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 14(1), 57–70. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v14i1.611>
- Ali, M., Prawening, C., & Samiaji, MH (2020). Inovasi Model Pembelajaran Jarak Jauh Program Kesetaraan Paket C Di Masa Pandemi Covid-19. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 15(2), 107–116. <https://doi.org/10.21009/jiv.1502.2>
- Apandi, S., Wasliman, I., Fiah, H., & Wati, H. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membentuk Perilaku Kewirausahaan (Studi Kasus Pada Pkbm Bina Mandiri Kota Cimahi Dan Pkbm Bina Warga Kabupaten Bandung). *Jurnal Internasional Penelitian Pendidikan & Ilmu Sosial*, 3(1), 186–200.

<https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i1.247>

- Basri, M., Dirawan, G., & Sinring, A. (2018). Peningkatan Kualitas Program pada Pusat Pendidikan Non Formal Kegiatan Prestasi Belajar di Kabupaten Majene. 23(4), 1–8. <https://doi.org/10.9790/0837-2304040108>
- Bonnes, C. (2020). Pendekatan untuk Mengajar dalam Pelatihan Profesional: Studi Kualitatif. 459–477.
- Dacholfany, MI (2018). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Non Formal Di Metro Lampung (Studi Kasus Pkbm Al-Suroya). Jurnal Tapis, Vol. 02(No. 1 Januari-Juni), Hal.45.
- Elihami. (2020). PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NONFORMAL PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ENREKANG 1 Program Studi Pendidikan Nonformal Universitas Muhammadiyah Enrekang ☐ Email yang sesuai : eliamid72@gmail.com ARTIKEL INFO Artikel Sejarah PENDAHULUAN Indonesia adalah. Edukasi Nonformal, 1(2), 32–40.
- Fakhrudin, & Shofwan, I. (2019). Dampak pendidikan nonformal dalam pengembangan masyarakat: Studi kasus di Pati, Indonesia. Jurnal Internasional Inovasi, Kreativitas dan Perubahan, 5(5), 339–352.
- Gadotti, M. (2011). Pendidikan orang dewasa sebagai hak asasi manusia: Konteks Amerika Latin dan perspektif ecopedagogic. Tinjauan Pendidikan Internasional, 57(1), 9–25. <https://doi.org/10.1007/s11159-011-9205-0>
- Gunartin, G., SOFFIATUN, S., & HAYATI, HFA (2018). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sebagai Tempat Alternatif Menumbuhkan Kemandirian Wirausaha Warga Belajar” (Studi Pada Pkbm Insan Karya Pamulang Tangerang Selatan). Pekobis : Jurnal Pendidikan, Ekonomi, Dan Bisnis, 3(2), 30. <https://doi.org/10.32493/pekobis.v3i2.p30-48.2043>
- Herlinda, S., Hidayat, S., & Djumena, I. (2017). Manajemen Pelatihan Hantaran dalam Meningkatkan Kecakapan Hidup Warga Belajar di Lembaga Kursus dan Pelatihan. Jurnal Pendidikan Nonformal dan Pemberdayaan Masyarakat, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.15294/pls.v1i1.14758>
- Istiqomah, N., & Artikel, I. (2017). Evaluasi Mutu Layanan Pendidikan Kesetaraan pada PKBM Citra Ilmu di Semarang. Jurnal Pendidikan Nonformal, 3(2), 149–157.
- Komar, O. (2017). Hubungan antara Kualifikasi Program Pendidikan Nonformal dengan Kompetensi Lulusan. Jurnal Pendidikan Nonformal, 3(2), 110–116.
- Madjar, N., & Cohen-Malayev, M. (2013). Gerakan pemuda sebagai pengaturan pendidikan mempromosikan pengembangan pribadi: Membandingkan motivasi dan pembentukan identitas dalam konteks pendidikan formal dan non-formal. Jurnal Internasional Penelitian Pendidikan, 62, 162–174. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2013.09.002>
- Menuju, P., & Berwirausaha, K. (2022). Jurnal Pendidikan Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat , Vol. IV, No.1 Maret 2022. IV(1), 289–295.
- Nurasiah, I., Lyesmaya, D., Ananta, A., Sumiarsa, D., & Ashlan, D. (2018). Pembinaan Tutor

- Pendidikan SD Non Formal Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Sukabumi. *Jurnal Internasional Pembelajaran Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 274. <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v2i4.16246>
- Oyigbo, DN, Ngwu, PNC, & Nwachukwu, RU (2021). Pendidikan nonformal dan pertumbuhan ekonomi di Nigeria: Kebutuhan akan kerangka pengembangan program di seluruh sistem. *Tinjauan Pendidikan Internasional*, 67(5), 687–709. <https://doi.org/10.1007/s11159-021-09920-y>
- Purwanto, E., Aunnurahman, A., & Wahyudi, W. (2018). Manajemen Pembinaan Program Pemerataan di Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) SKB Kabupaten Kubu Raya. *JETL (Jurnal Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran)*, 3(2), 260. <https://doi.org/10.26737/jetl.v3i2.760>
- Putri, SN (2018). Pelaksanaan Program Pendidikan Non Formal Bagi Masyarakat Desa Di Kota Batu. *Jurnal Isu Pemerintah Daerah*, 1(2), 178. <https://doi.org/10.22219/logos.vol1.no2.178-201>
- Rizka, MA, & Hardiansyah, R. (2016). Strategi pengembangan inovasi program pendidikan nonformal sebagai best practice bagi pusat kegiatan belajar masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 187. <https://doi.org/10.21831/jppm.v3i2.10745>
- Saepudin, A., Akhyadi, AS, & Saripah, I. (2019). Model Konseptual Pengembangan Manajemen Satuan Pendidikan Nonformal untuk Mutu Layanan Pendidikan. *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 35(2), 419–429. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i2.5055>
- Sugiono. (2015). Metode penelitian pendidikan (ke-22). ALFABETA.
- Suryadi, A., & Mutiara, D. (2020). Strategi Pencapaian Standar Layanan Pendidikan Nonformal Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. *Tahdzibi*, 5(1), 49–56. <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.5.1.49-56>
- Usman, O., & Tasya, S. (2020). Pengaruh E-Learning, Gaya Belajar, dan Minat Belajar Terhadap Motivasi Belajar Siswa. *Jurnal Elektronik SSRN*, 7(1), 103–111. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3647301>
- Van der Linden, J. (2015). Pendidikan nonformal dan kemitraan baru dalam situasi (pasca)konflik. “Tiga batu masak menopang satu panci”. *Jurnal Internasional Pengembangan Pendidikan*, 42, 54–62. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2015.03.002>
- Varanda Marques, JB, & de Freitas, D. (2016). Memetakan masa depan pendidikan nonformal dan diseminasi ilmiah astronomi di Brasil: Sebuah studi delphi. *Masa Depan Kebijakan dalam Pendidikan*, 14(8), 1153–1181. <https://doi.org/10.1177/1478210316674158>
- Werakul, N., Pathumcharoenwattana, W., & Amatayakul, K. (2014). Komponen Utama Program Pendidikan Nonformal Menggunakan Prinsip Moral Neo-humanis untuk Meningkatkan Etika dalam Merawat Lansia untuk Masyarakat Menunda. *Procedia - Ilmu Sosial dan Perilaku*, 152, 903–910.

<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.341>

Putih, I. (2016). dan potensinya untuk dialihkan dari pendidikan nonformal ke pendidikan formal. *Tinjauan Pendidikan Internasional*, 62(6), 771–790.

<https://doi.org/10.1007/s11159-016-9603-4>

Widodo, W., Darmawanti, I., & Kharisma, NN (2021). Strategi Pengembangan Pendidikan Non Formal Melalui Keterampilan Kewirausahaan di PKBM Budi Utama Surabaya. 7(1), 23–31.

Zikargae, MH, Woldearegay, AG, & Skjerdal, T. (2022). Pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui pendidikan lingkungan non-formal: Sebuah studi empiris tentang proyek masyarakat pembangunan lingkungan dan hutan di Ethiopia. *Heliyon*, 8(3), e09127. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09127>